

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM LISTRIK PINTAR PRABAYAR  
DI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**MUZDALIFAH**

**E011181007**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

## **ABSTRAK**

**Muzdalifah (E011181007), Implementasi Program Listrik Pintar Prabayar di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, xiii + 93 Halaman + 9 Tabel + 11 Gambar + 24 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing Oleh Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., M.P.A., M.Sc dan Adnan Nasution, S. Sos., M. Si**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program listrik pintar (prabayar) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada informan dan juga melalui observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Listrik Pintar Prabayar di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar masih belum maksimal. Secara umum masyarakat Kecamatan Wonomulyo belum sepenuhnya beralih ke program listrik pintar prabayar karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak PLN kurang masif dilakukan. Hal itu dibuktikan dengan proses penyebaran informasi yang tidak merata kepada masyarakat. Selain itu prosedur yang lamban serta fasilitas yang belum memadai menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat tidak antusias untuk beralih ke program listrik pintar prabayar ini. Faktor lain juga berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang perhitungan biaya listrik yang digunakan pada listrik prabayar dan pascabayar.

***Kata Kunci: Implementasi, Listrik Pintar (Prabayar).***



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

## **ABSTRACT**

**Muzdalifah (E011181007), Implementation of the Prepaid Smart Electricity Program in Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, xiii + 93 Pages + 9 Tables + 11 Figures + 24 Bibliography + Attachments + Supervised by Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., M.P.A., M.Sc and Adnan Nasution, S. Sos., M. Si**

In general, this study aims to describe the implementation of a smart (prepaid) electricity program in Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency.

The research method used is qualitative with a descriptive approach. The data collected consists of primary data and secondary data. By using qualitative methods and descriptive approaches, the data collection techniques used are interviews with informants and also through observation and documentation.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Prepaid Smart Electricity Program in Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency is still not optimal. In general, the people of Wonomulyo District have not fully switched to the prepaid smart electricity program because it is influenced by several factors, one of which is that the delivery of information by PLN is not massive enough. This is evidenced by the process of disseminating information that is not evenly distributed to the public. In addition, slow procedures and inadequate facilities are factors that cause people to be unenthusiastic about switching to this prepaid smart electricity program. Another factor is the lack of public understanding of the calculation of the cost of electricity used in prepaid and postpaid electricity.

***Keywords: Implementation, Smart Electricity (Prepaid)***



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muzdalifah

Nim : E011 18 1007

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM LISTRIK PINTAR PRABAYAR DI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 05 Juli 2022

Yang menyatakan



Muzdalifah  
E011 18 1007



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

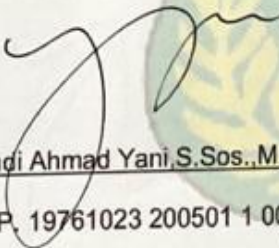
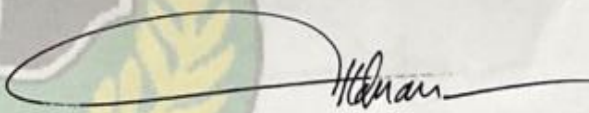
Nama : Muzdalifah  
NIM : E011 18 1007  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Program Listrik Pintar Prabayar di  
Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., M.P.A., M.Sc  Adnan Nasution, S. Sos., M. Si

NIP. 19761023 200501 1 001

NIP. 19740707 200501 1 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Administrasi



Wurhan Jara, M.Si

NIP. 19630903 198903 1 002



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muzdalifah  
NIM : E011 18 1007  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Program Listrik Pintar Prabayar di  
Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi.. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

#### Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., M.P.A., M.Sc (.....)

Sekretaris Sidang : Adnan Nasution, S. Sos., M. Si (.....)

Anggota : 1. Dr. Nurdin Nara, M.Si (.....)

2. Drs. Nelman Edy, M.Si (.....)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM LISTRIK PINTAR PRABAYAR DI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR”** ini dengan tepat waktu yang merupakan salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan studi.

Sholawat dan Salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam menjalankan kehidupan di dunia, sang revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita dari jaman jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Penulis mengetahui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keminiman pengetahuan yang dimiliki. Namun, dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha melakukan yang terbaik saat menulis dan menyusun skripsi ini, sehingga penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik dalam upaya membangun penulisan yang baik dan berkualitas.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis ayahanda tiri tercinta Husnadi dan ibunda Minarti, atas dukungan, motivasi, bahkan kasih sayang berupa dorongan kuat yang berupa moril maupun materi. Kepada adik saya tercinta Muhammad Fajri dan Muhammad Hasraf, penulis ucapkan juga banyak terimakasih telah bekerja sama dan saling

membantu selama ini. Semoga ayahanda dan ibunda penulis senantiasa diberi rahmat dan lindungan dari Allah SWT aamiin.

Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yang dalam penulisannya tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dosen pembimbing dari penulis yakni Bapak Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., M.P.A., M.Sc selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Adnan Nasution, S. Sos., M. Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan banyak terimakasih serta rasa syukur yang sangat besar.

Penulisan skripsi ini tidak luput dari dorongan dan motivasi dari pihak keluarga penulis saja, ada beberapa pihak yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada pihak-pihak yang terlibat, terkhususnya kepada :

1. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi.
2. Andi Rahmat Hidayat, S.Sos., M.Si selaku dosen penasihat akademik selama kurang lebih 4 tahun, terimakasih atas nasehat dan bimbingannya.
3. Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., M.P.A., M.Sc selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal, hingga tersusunnya skripsi ini.



4. Adnan Nasution, S. Sos., M selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Nurdin Nara, M.Si dan Drs. Nelman Edy, M.Si sebagai penguji yang telah memberikan banyak input dalam ujian proposal dan skripsi penulis, dan Terimakasih atas kesediaannya dalam menghadiri ujian proposal dan skripsi.
6. Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan yang inshaAllah bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma, Pak Lili, dll) dan Staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
8. Terima kasih kepada bapak CAMAT (Sulaiman MK, SP.MM) Kecamatan Wonomulyo beserta Staf/Pegawai Kantor Kecamatan atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
9. Terima kasih kepada Staf PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan penelitian di lokasi penelitian.
10. Terima kasih kepada Masyarakat Kecamatan Wonomulyo yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan membantu pada proses penelitian di wilayah Kecamatan Wonomulyo.
11. Terima kasih kepada Fatia Ningsih Maliki, S.A.P senior baik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam membantu penulis ketika penyusunan proposal dan skripsi.
12. Terima kasih kepada teman-teman penulis (Nur Elna, S.KM, Sri Wahyuni, Mutmainnah Hamzah, Thahira dan Fitra Tulqur'ani) yang telah memberikan

support dan motivasi serta meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam proses penelitian.

13. Terima kasih kepada Mega Suci A, S.A.P , Sakhratun Nisa, S.A.P dan Nurul Pratiwi, S.A.P yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun tugas akhir atau skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Prada Risal sebagai *support system* penulis dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir.
15. Terima kasih kepada SISTERHOOD (Dhinda Kharima, Febi Febrianti, Gita Winika Putri, Namirah, Ratnika Juliany Ramadan, Reski Nurul Hidayah, Suci Khaerunnisa Nur Ramadani, dan Ummu Kalsum Ridwan) yang telah memberikan motivasi dukungan dan kenangan manis bagi penulis selama masa perkuliahan serta membantu dalam penyusunan skripsi.
16. Terima kasih kepada BK\_SQUAD (Ahmad Farhan, Febi Febrianti, Firman, dan Gita Winika Putri) yang terus memberikan semangat dan dukungan selama ini.
17. Terima kasih kepada ROOM 207 (Anisa Nuratmi dan Febi Febrianti) yang telah berbaik hati memfasilitasi tempat tinggal bagi penulis selama ini dan menjadi rumah untuk penulis dalam menyampaikan keluh kesahnya.
18. Teman seperjuangan selama perkuliahan LENTERA 2018, terimakasih telah menjadi saudara selama empat tahun ini dalam menjalani suka duka perkuliahan.
19. Terima kasih kepada HUMANIS FISIP Unhas yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi bagi penulis semoga tetap jaya dalam kebersamaan.

20. Terima kasih kepada UKM SENI TARI UNHAS yang telah menjadi tempat bagi penulis dalam mengepresikan minat dan bakatnya semoga tetap jaya dalam berkarya.

21. Terima kasih teman-teman KKN PINRANG 3 yang telah memberikan pengalaman, pengetahuan, dan ilmu-ilmunya.

Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan, arahan dan dorongan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan membalas kebaikan semua pihak yang telah berperan dalam penulisan karya ilmiah ini.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Makassar, 11 Mei 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	5
I.3 Tujuan Penelitian .....	6
I.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1 Konsep Implementasi.....	7
II.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	7
II.1.2 Teori-Teori Implementasi Kebijakan .....	9
II.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan .....	24
II.2 Konsep Program .....	31
II.2.1 Pengertian Program .....	31
II.3 Listrik Pintar Prabayar.....	33
II.3.1 Listrik Pintar Prabayar .....	33
II.3.2 Kelebihan Listrik Pintar Prabayar .....	35
II.3.3 Kelemahan Listrik Pintar Prabayar .....	38
II.4 Penelitian Terdahulu .....	40
II.5 Kerangka Pikir.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
III.1 Pendekatan Penelitian .....	47
III.2 Lokasi Penelitian .....	47
III.3 Unit Analisis .....	48
III.4 Fokus Penelitian.....	48

III.5 Narasumber dan Informan.....	50
III.6 Jenis dan Sumber Data .....	51
III.7 Teknik Pengumpulan Data .....	52
III.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	53
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
IV.1.1 Letak Geografis .....	55
IV.1.2 Topografi .....	57
IV.1.3 Geologi .....	58
IV.1.4 Kependudukan.....	58
IV.1.5 PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar .....	60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
V.1 Implementasi Program Listrik Pintar Prabayar diKecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar .....	63
V.1.1 Komunikasi .....	65
V.1.2 Sumber Daya.....	71
V.1.3 Disposisi .....	77
V.1.4 Struktur Birokrasi .....	83
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
V.1 Kesimpulan .....	89
V.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Jumlah Pelanggan PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo.....	3
Tabel I.2 Jumlah Jenis-Jenis Pelanggan Prabayar PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel V.1 Kesimpulan Hasil Wawancara Variabel Komunikasi .....	70
Tabel V.2 Jumlah Staf dan Petugas Lapangan PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo.....	72
Tabel V.3 Jumlah Fasilitas Penunjang Pekerjaan PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo.....	76
Tabel V.4 Kesimpulan Hasil Wawancara Variabel Sumber Daya .....	77
Tabel V.5 Kesimpulan Hasil Wawancara Variabel Disposisi.....	83
Tabel V.6 Kesimpulan Hasil Wawancara Variabel Struktur Birokrasi.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Implementasi Kebijakan Model Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Mazmanian dan Sabatier (1983) .....	26
Gambar II.2 Model Implementasi Kebijakan Model Meter dan Horn (1975) dalam Anggara (2018).....	27
Gambar II.3 Model Implementasi Kebijakan Model Edwards III (1980) dalam Edwards III (1980) .....	28
Gambar II.4 Model Implementasi Kebijakan Model Grindle (1980) dalam Grindle (1980) .....	30
Gambar II.5 Model Implementasi Kebijakan Model Pressman dan Wildavsky (1973) dalam Anggara (2018) .....	31
Gambar II.6 Kerangka Pikir .....	46
Gambar IV.1 Peta Wilayah Kecamatan Wonomulyo .....	57
Gambar IV. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Wonomulyo.....	59
Gambar IV.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo.....	61
Gambar V.1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisai Secara Langsung PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo.....	67
Gambar V.2 SOP ( <i>Standart Operating Procedure</i> ) PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo.....	85

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Listrik Pintar merupakan salah satu layanan yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero). Sejalan dengan perkembangan teknologi guna memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Hal ini mendorong organisasi publik untuk berlomba-lomba meningkatkan pelayanan publik. Listrik ini merupakan produk publik yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang dan pelayanan ketenagalistrikan yang dimana perlu mendapat perhatian yang serius. Sehabis perihal tersebut kerap terjalin PT PLN (Persero) menciptakan perkaranya dengan dikeluarkannya kebijakan dalam wujud pelayanan pembayaran listrik secara prabayar (Listrik Pintar) semenjak tahun 2008 dan listrik pintar ini diluncurkan tahun 2009 dan terstandarisasi diseluruh Indonesia. Kemudian terus-menerus hadapi pergantian/penggondokan serta mulai di implementasikan pada tahun 2013 pada PT PLN (Persero) disegala Nusantara (Kadim, 2018).

Hingga dengan mengacu pada Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan bertepatan pada 23 September 2009 menghasilkan sesuatu kebijakan selaku bentuk komitmen terhadap pelanggan ialah listrik pintar (prabayar). Dengan terdapatnya inovasi baru ini, harapannya sistem ini bisa menghemat pemakaian listrik. Akan tetapi, tujuan utama program listrik prabayar ini merupakan buat memberikan kemudahan kepada pelanggan melaksanakan penghematan listrik disesuaikan dengan penggunaannya. Peluncuran inovasi



program ini dilatarbelakangi selaku bentuk PLN dalam berkomitmen membagikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya.

Sebelum peluncuran inovasi baru pelanggan PLN menggunakan layanan listrik pascabayar, yakni pelanggan memakai energi listrik dahulu dan membayar di akhir bulan selanjutnya dengan layanan listrik pascabayar, tiap bulan PLN wajib mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang wajib dibayar pelanggan, melaksanakan penagihan terhadap pelanggan yang terlambat ataupun tidak membayar, serta menetapkan peredaran listrik jika konsumen terlambat ataupun tidak membayar rekening listrik sehabis saat eksklusif.

Sebab seiring berjalannya waktu tidak banyak dari berbagai bermacam kalangan warga ini yang paham betapa beratnya industry dalam mengendalikan pasokan ke seluruh penjuru sehingga seluruhnya bisa terpenuhi serta sumber energi yang dibutuhkan dapat tercukupi. Masih ada yang memakai listrik tanpa perhitungan, boros, kurang bertanggungjawab. Sehingga menyebabkan jumlah persediaan terhadap sumber energi listrik juga menipis dan terbatas. Belum lagi kebiasaan warga menunda-nunda pembayaran listrik sehingga otomatis membuat PT PLN (Persero) merugi dan biasanya pihak PLN melakukan pemadaman listrik untuk mencegah hal tersebut (Kadim, 2018).

Kebijakan dari program listrik pintar (prabayar) yang merupakan bagian dari kebijakan PT PLN (Persero) pusat, kini juga di jalankan pada area daerah Kabupaten Polewali Mandar salah satunya pada PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo sejak tahun 2013, dengan Peraturan terkait Kebijakan Penggunaan Listrik Pintar PKS PLN No.001.PJ/AGA.00.03/160400/2020 dengan Pemerintah Daerah No.415/03/PKS/II/2020 perihal Pungutan dan Penyetoran Pajak

Penerangan Jalan serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini merupakan sebuah wujud dalam merealisasikan kebijakan pusat terkait listrik pintar pada masa kepemimpinan direktur utama Edi Widiono berdasarkan surat edaran Direksi PT PLN (Persero) No.035.E/012/DIR/2001, tanggal 31 Desember 2002 Wacana Petunjuk Pelaksanaan Tarif Multiguna Prabayar, sampai tahun 2008 produk ini muncul kepermukaan walaupun akhirnya baru diresmikan di tahun 2009 sesuai Surat Direksi PT PLN (Persero) No.01809/532/DITJB/2009, tanggal 13 Februari 2009 tentang Implementasi Listrik Pintar, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.300.K/DIR/2009, tanggal 23 Desember 2009 Wacana Ketentuan Akuntansi Listrik Pintar. Surat Direksi PT PLN (Persero) No.01178/532/DITBMR/2010, tanggal 17 Februari 2010 tentang Implementasi Listrik Pintar serta terakhir Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.1484.K/DIR/2011, tanggal 23 Desember 2011 tentang Branding Produk Listrik Pintar (Kadim, 2018).

**Tabel 1.1 Jumlah Pelanggan PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggan</b>	<b>Pascabayar</b>	<b>Listrik Pintar (Prabayar)</b>
2016	43.691	24.972	18.719
2017	47.110	24.856	22.254
2018	51.649	24.806	26.843
2019	55.286	24.609	30.677
2020	58.799	24.410	34.389
2021	60.785	24.323	36.462

Sumber : PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo 2021

Berdasarkan tabel diatas kebutuhan jumlah pemakaian listrik pintar (prabayar) semakin meningkat dari tahun ketahun. Melihat fenomena perbandingan pengguna listrik pintar (prabayar) dan pengguna listrik pascabayar kebijakan program listrik pintar pada wilayah Kecamatan Wonomulyo masih terhitung belum maksimal walaupun terjadi peningkatan pelanggan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keseluruhan masyarakat belum sepenuhnya menggunakan listrik pintar yang dimana sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan program ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan pada penggunaan listrik pascabayar.

Berikut adalah rincian jenis pelanggan Prabayar berdasarkan tabel diatas berdasarkan jumlah pelanggan pada tahun terakhir ini.

**Table I.2 Jenis-Jenis Pelanggan Prabayar PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo**

<b>Jumlah Pelanggan Tahun 2021</b>	<b>Pasang Baru</b>	<b>Migrasi</b>
36.462	21.186	15.276

Sumber : PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo 2022

Berdasarkan tabel sebelumnya dan berkaitan dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Wonomulyo sudah banyak yang menggunakan listrik pintar dibanding pascabayar karena beberapa masyarakat masih belum beralih. tetapi pada dasarnya pengguna prabayar tersebut didominasi dengan layanan pengguna pasang baru dibanding dengan migrasi.

hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penggunaan listrik pintar prabayar bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sitohang (2018). Penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi program layanan listrik pintar (prabayar) di PT PLN Ranting Medan Denai, dengan melihat beberapa variabel implementasi yaitu standar sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi serta disposisi implementor. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahas tentang bagaimana suatu implementasi program listrik pintar (prabayar) di Kecamatan Wonomulyo dengan melihat beberapa variabel yang dikemukakan oleh George C Edwards III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hal itu perlunya dikaji terlebih dahulu bagaimana implementasi kebijakan program listrik pintar pada PT PLN (Persero) Rayon Wonomulyo mengenai penyebab masyarakat belum beralih pada listrik pintar secara keseluruhan, dengan mengangkat judul penelitian **“Implementasi Program Listrik Pintar (Prabayar) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu: bagaimana implementasi program listrik pintar (prabayar) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan implementasi program listrik pintar (prabayar) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, peneliti berharap manfaat yang nantinya diperoleh dapat dijadikan bahan pembelajaran dan informasi penting untuk diri pribadi dan secara umum, untuk masyarakat luas dan stakeholder terkait. Adapun manfaat yang diharapkan yakni:

#### **1. Manfaat Akademis**

Diharapkan dengan penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang implementasi kebijakan program dari pemerintah dan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait implementasi program listrik pintar (prabayar).

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan alternatif yang praktis bagi stakeholder terkait agar mampu mengintropeksi hal-hal tentang implementasi program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkhusus program listrik pintar (prabayar) dalam penerapannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1 Konsep Implementasi

Riset implementasi ialah sesuatu kajian menimpa riset kebijakan yang menuju pada proses penerapan dari sesuatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan ialah sesuatu proses yang begitu lingkungan tidak apalagi tidak sering bermuatan politis dengan terdapatnya intervensi bermacam kepentingan (Mursalim, 2017).

Implementasi kerap dikira cuma ialah penerapan dari hal- hal yang sudah diputuskan oleh legislatif ataupun para pengambil keputusan, seolah- olah tahapan ini kurang mempengaruhi. Hendak namun, dalam realitasnya, tahapan implementasi jadi begitu berarti sebab sesuatu kebijakan tidak hendak berarti bila tidak bisa dilaksanakan dengan baik serta benar. Dengan kata lain, implementasi ialah sesi sesuatu kebijakan dilaksanakan secara optimal serta bisa menggapai tujuan kebijakan (Anggara, 2018).

##### II.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris ialah *to implement*, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi ialah penyediaan fasilitas buat melakukan sesuatu yang memunculkan akibat ataupun akibat terhadap suatu. Suatu tersebut dicoba buat memunculkan akibat ataupun akibat itu bisa berbentuk undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, serta kebijakan yang terbuat oleh lembaga- lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Sobirin, 2017). Secara etimologis implementasi itu bisa dimaksudkan selaku

sesuatu kegiatan yang bertalian dengan penyelesaian sesuatu pekerjaan dengan pemakaian fasilitas( perlengkapan) buat mendapatkan hasil (Simorangkir, 2022).

Purwanto (2012) menerangkan kalau Implementasi merupakan aktivitas buat mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dicoba oleh para implementator kepada kelompok sasaran(*target group*) selaku upaya buat mewujudkan kebijakan (Yanuarita, 2019).

Friedrich (1969) melihat penerapan “Kebijakan Publik” sebagai tindakan yang dilakukan oleh berbagai elemen, baik individu, kelompok, pemerintah itu sendiri dalam membuat kebijakan berdasarkan hambatan dan peluang yang mereka hadapi dalam lingkungan di mana mereka berada dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu (Muhafidin, 2020).

*Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problems(s) to be addressed, stipulates the objectives(s) to be pursued, and, in a variety of ways, “structures” the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts-both intended and unintended-of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and, finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute (Mazmanian & Sabatier, 1983: 20-21).*

Meter dan Horn (1975) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional selama periode waktu tertentu, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan (Sobirin, 2017).

## II.1.2 Teori-Teori Implementasi Kebijakan

Dinamika hubungan antaraktor, instansi atau organisasi dalam implementasi kebijakan dibahas oleh semua teori implementasi. terdapat beberapa aktor yang mengemukakan teorinya meskipun dengan intensitas dan sebutan yang berbeda tetapi maksud dari teori memiliki tujuan yang sama.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

### a) Karakteristik Masalah

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah akan memengaruhi mudah-tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.



3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaiknya, sebuah program relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

**b) Karakteristik Kebijakan**

1. Kejelasan isi kebijakan. Hal ini semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk se tiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan

pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar-institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

**c) Lingkungan Kebijakan**

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.
3. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara seperti, kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif.
4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Meter dan Horn (1975) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut (Anggara, 2018: 242).

- a) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.

- b) Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
- c) Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- d) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat control hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
- e) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi).
- f) Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).

(Edwards III, 1980:9) *State In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation? We shall attempt to answer these important questions by considering four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure.*

Edwards III (1980) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari yang menanyakan: Apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer

untuk implementasi kebijakan yang sukses? Kita akan menjawab pertanyaan penting ini dengan mempertimbangkan empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

**a) *Communication* (Komunikasi)**

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Secara alami, komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh para implementor. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, namun mereka mesti juga jelas. Jika tidak, para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) untuk mendorong tinjauannya dalam implementasi kebijakan, memandang bahwa mungkin berbeda dengan pandangan atasannya.

**b) *Resources* (Sumber Daya)**

Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah kemungkinan menjadi tidak efektif. Sebagaimana contoh ini, dimana sumberdaya bisa menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

**c) *Dispositions* (Disposisi)**

Disposisi implementor, jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara rumit. Banyaknya kebijakan jatuh dalam “*some apathy*”. Kebijakan ini kemungkinan akan diimplementasikan secara meyakinkan karena para implementor tidak memiliki perasaan kuat mengenainya. Kebijakan lain, bagaimanapun juga, akan mengalami konflik langsung dengan tinjauan kebijakan atau kepentingan implementor secara pribadi atau organisasional. Ketika orang-orang ini diajak untuk mengamalkan peraturan dengannya mereka tidak setuju, penyimpangan yang tidak direlaxkan lagi terjadi diantara keputusan kebijakan-kebijakan dan kinerja. Dalam kasus demikian implementor akan mengamalkan seleksinya, kadang dalam berbagai cara yang mendiskriminasikan, untuk menunda implementasi.

**d) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)**

Bahkan jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasional mungkin merintangangi koordinasi yang perlu untuk mengimplementasikan dengan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang, dan mungkin juga memboroskan sumberdaya langka, merintangangi

perubahan, menciptakan kekacauan, mengarahkan kepada kebijakan bekerja dalam lintas-tujuan, dan menghasilkan fungsi-fungsi penting yang terabaikan. Sebagaimana unit-unit organisasional selenggarakan kebijakan mereka mengembangkan prosedur pengoperasian standar (*standard operating procedur*) SOP, untuk menangani situasi rutin dalam pola hubungan yang beraturan. Malangnya, SOP yang dirancang untuk kebijakan-kebijakan masa depan sering tidak tepat bagi kebijakan-kebijakan baru dan mungkin menyebabkan perintang terhadap perubahan yang tidak diinginkan. SOP kadang merintang bukan membantu implementasi kebijakan.

Edwards III (1980) mengemukakan empat faktor kritis atau variabel yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi (Anggara, 2018: 250-254).

#### **a) Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Intensitas dalam

mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Selanjutnya, ia mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

- Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).

- Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, di antaranya:

1. kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan;
2. adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut;
3. kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut;



4. kebijakan baru yang para perumusny belum terlalu menguasai masalah;
5. biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum. Pada bagian ini, selain mengaitkan implementasi dengan tipe/jenis kebijakan,

- **Konsistensi**

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, di antaranya:

1. kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan;
2. kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru;
3. kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain;
4. banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

## **b) Sumber Daya**

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III (1980), yaitu sebagai berikut.

- Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau,

menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain

- Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.

### **c) Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.

- Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

- Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

#### **d) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi Edwards III (1980) adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

*State the process of implementation is greatly affected by the kinds of objectives that have been specified for it and by the manner in which the goals have been stated. That is, formulation decisions made-or not made-about the type of policy to be pursued and the shape of programs to be executed are integral factors in determining how successfully the programs themselves will be delivered (Grindle, 1980:8).*

Grindle (1980) mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context*-nya, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan. mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context*-nya.

#### **a) Content of Policy (Isi Kebijakan)**

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan

perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

- **Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program**

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya, jenis kebijakan redistribution), implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

- **Jenis manfaat yang akan dihasilkan**

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

- **Jangkauan perubahan yang diinginkan**

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya, kebijakan antikorupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh beberapa presiden RI dengan berbagai badan pemeriksa, tetapi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dilakukan dengan konsisten.

- **Kedudukan pengambil keputusan**

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

- **Pelaksana program**

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

- **Sumber daya yang disediakan**

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakann akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, dan sarana, dan lain-lain.

**b) *Context of Implementation (Konteks Implementasi)***

Konteks implemetasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi sebagai berikut.

- **Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat**

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati output-nya.

- **Karakteristik lembaga dan penguasa**

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa” (misalnya, pengusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor.

*State It is possible that evaluation, being better entrenched will subsume implementation as part of a broader view of its subject matter. Then again, evaluation might give way to a still broader designation called policy analysis, which, in turn, might be replaced by the field it once thought to replace, namely, planning (Pressman & Wildavsky, 1973:xvii).*

Karya Pressman dan Wildavsky (1973) adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Tulisan mereka menyatakan bahwa persoalan implementasi dan tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara matematis. Rumusan mereka mungkin berguna ketika policy implementasi tidak melibatkan banyak aktor dan berbagai tingkatan sehingga faktor-faktor hubungan yang kritis bisa diperhitungkan untuk bisa segera diambil tindakan perbaikan. Akan tetapi, rumusan ini sulit diterapkan pada kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, apalagi mengingat hubungan antaraktor dari berbagai organisasi/departemen sangat jarang berlangsung mulus karena masing-masing juga mengejar pencapaian tujuannya. Pendekatan *Game Theory* mungkin lebih bisa

dimanfaatkan daripada teori probabilitas untuk menganalisis implementasi. Dengan kata lain, pendekatan kolaborasi antara aktor yang terlibat bisa direkomendasikan untuk mengatasi kemacetan hubungan dalam mata rantai implementasi. Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan seharusnya tidak menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi karena implementasi kebijakan membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi top-down serta sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. Jika sistem tidak mengizinkan kondisi seperti itu, sebaiknya pembuat kebijakan membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi.

### **II.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan**

Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) model ini disebut *A Frame Work for Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi). Mereka berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-yujuan formal pada keseluruhan implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, antara lain sebagai berikut.

- a) Mudah-tidaknya masalah yang akan dikendalikan, mencakup:
- kesukaran teknis;
  - keragaman perilaku kelompok sasaran;
  - persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk;
  - uang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

b) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, mencakup:

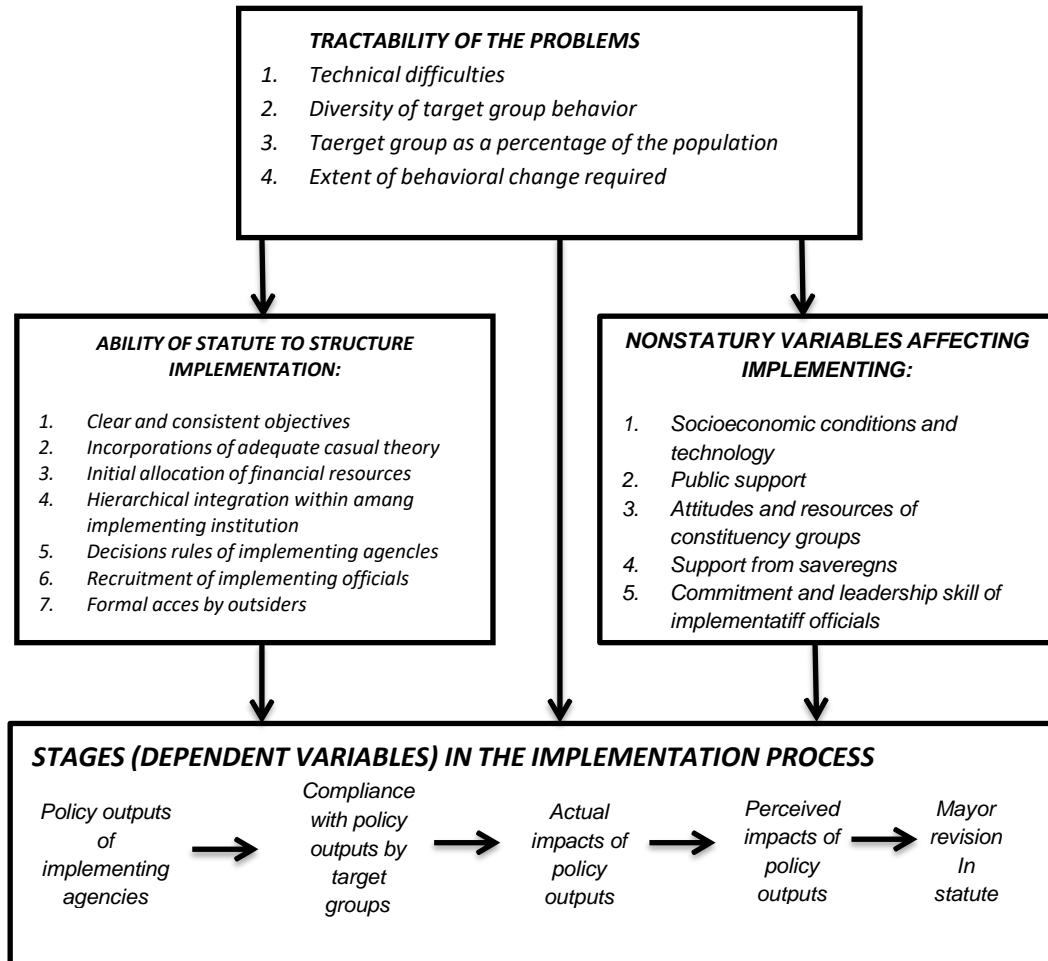
- kejelasan dan konsistensi tujuan;
- digunakan teori kausal yang memadai;
- ketetapan alokasi sumber dana;
- keterpatuan hierarki dalam dan di antara lembaga-lembaga pelaksana;
- aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana;
- rekrutmen pejabat pelaksana;
- akses formal pihak luar.

c) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, mencakup:

- kondisi sosio-ekonomi dan teknologi;
- dukungan publik;
- sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok;
- dukungan dari pejabat atasan;
- komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.



**Gambar II.1 Model Implementasi Kebijakan Model Mazmanian dan Sabatier (1983)**



Sumber: (Mazmanian dan Sabatier,1983:21)

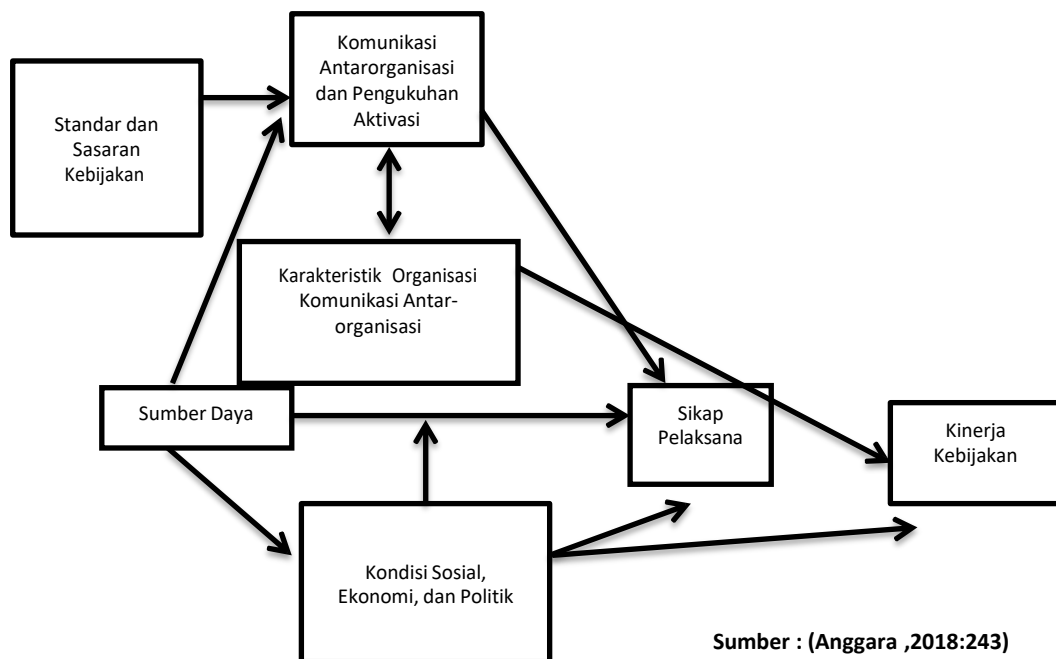
Model yang dikembangkan oleh Meter dan Horn (1975) merupakan model yang biasa disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* (model proses implementasi kebijaksanaan). Tipologi menurut mereka, yaitu jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Hal lain yang dikemukakan oleh Meter dan Horn bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh

sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan (Anggara, 2018).

Variabel-variabel bebas itu, antara lain:

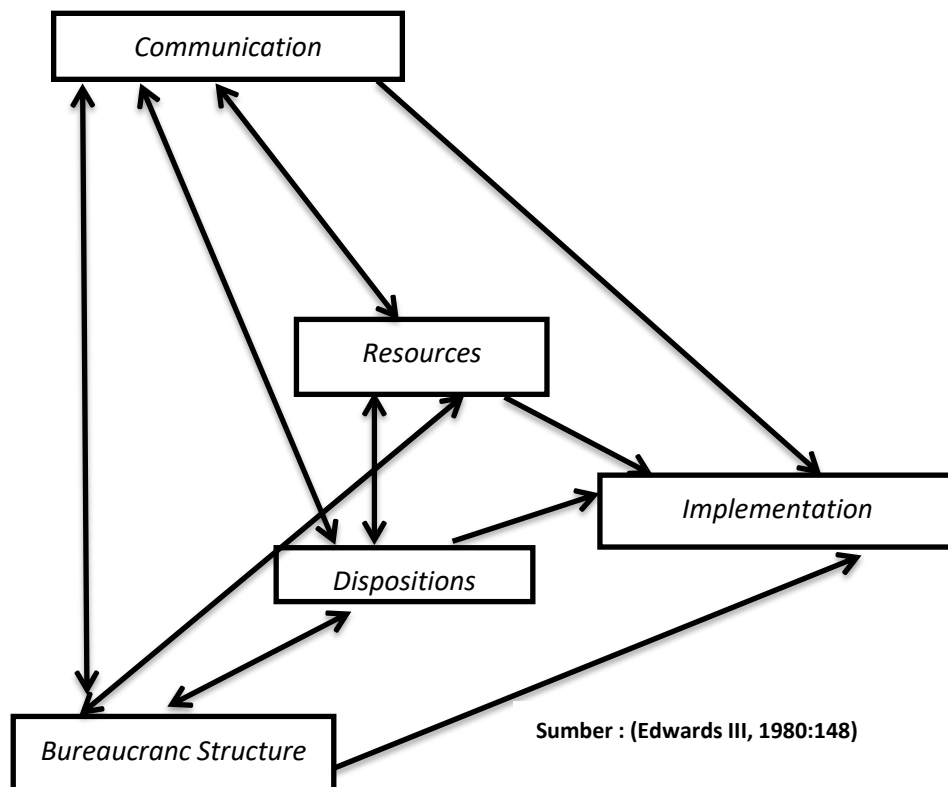
- a) ukuran dan tujuan kebijaksanaan;
- b) sumber-sumber kebijaksanaan;
- c) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksanaan;
- d) komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan;
- e) sikap para pelaksana;
- f) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

**Gambar II.2 Implementasi Kebijakan Model Meter dan Horn**



Edwards III (1980) mengenai model yang dikembangkannya, ia mengemukakan empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, "Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?" dan "Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?" dan menemukan empat variabel. Keempat variabel tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

**Gambar II.3 Model Implementasi Kebijakan Model Edwards III**



Grindle (1980) model kebijakan yang dikembangkan yakni dapat dipahami bahwa keunikannya ini terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan. Dalam model ini implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

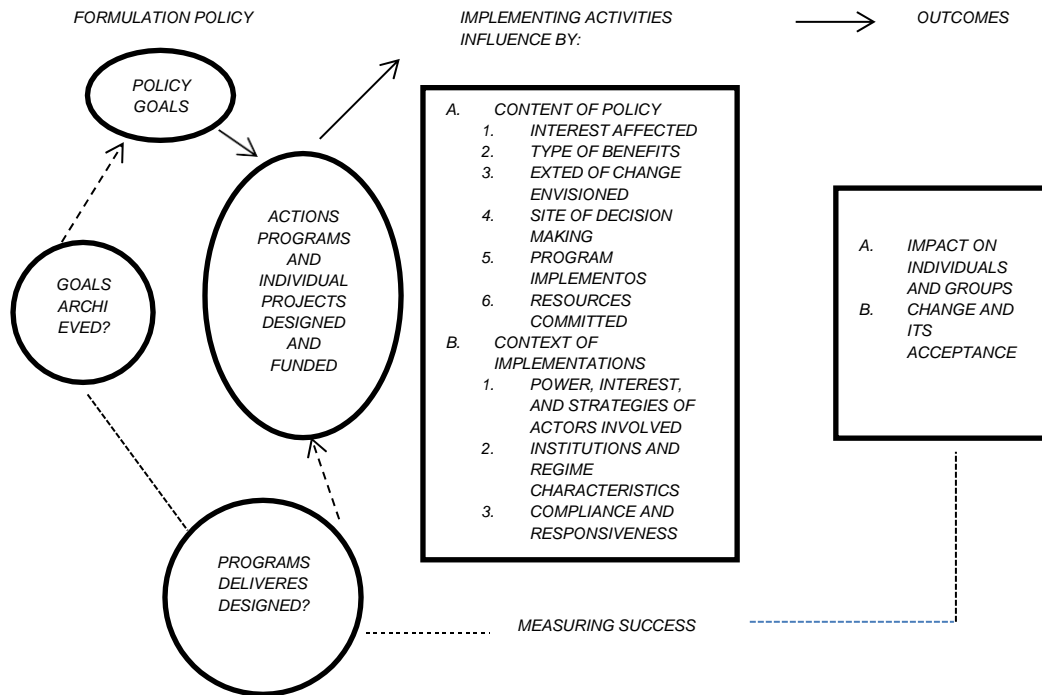
a) Isi Kebijakan tersebut mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program,
6. Sumber daya yang dikerahkan.

b) Lingkungan Kebijakan mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga dan penguasa,
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

**Gambar II.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle (1980)**

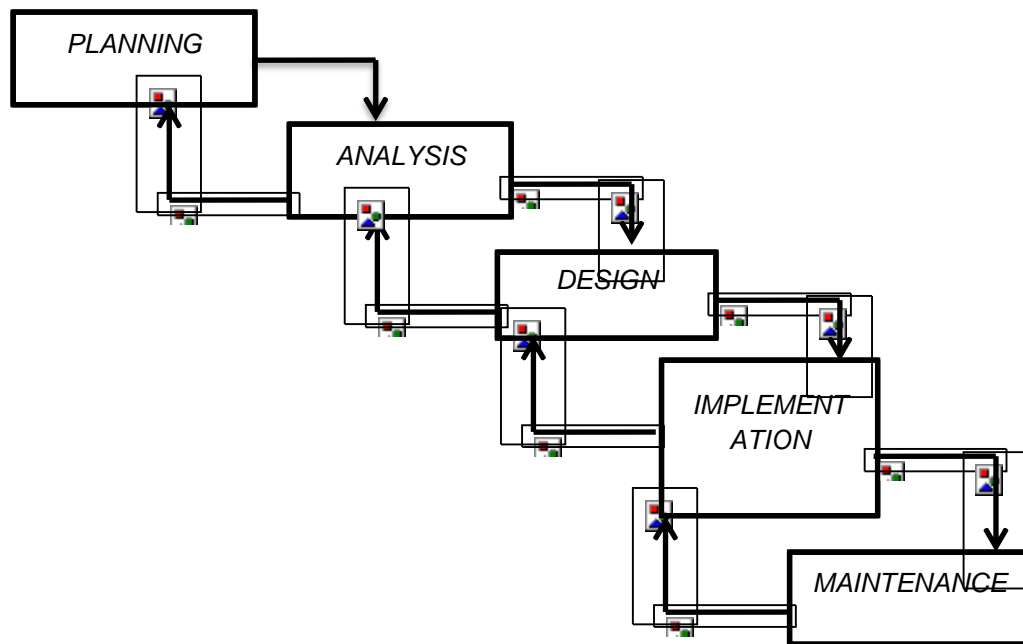


Sumber : (Grindle, 1980:11)

Pressman dan Wildavsky (1973) model kebijakan ini bersifat top-down, yang mengasumsikan bahwa hal-hal yang sudah diputuskan (*policy*) adalah alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil maka kontrol administrasi dalam pengimplementasiannya adalah hal mutlak. Ciri dari pendekatan ini adalah memandang pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara rasional. Implementasi adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses administrasi yang terpisah dari penentuan kebijakan (yang bersifat politik). Dengan demikian, implementasi sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai

tujuan. Faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi membangun mata rantai hubungan sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak.

**Gambar II.5 Model Implementasi Kebijakan Model Pressman dan Wildavsky (1973)**



Sumber: (Anggara 2018:239)

## II.2 Konsep Program

### II.2.1 Pengertian Program

Program bisa dikatakan baik bukan cuma dilihat dari wujud program yang dikeluarkan, namun apakah program itu telah sanggup menanggapi cocok kebutuhan yang dibutuhkan. Pelaksana program yang baik serta sanggup mengakomodir sasaran yang terdapat dalam perihal ini warga buat bisa menanggapi kebutuhan serta mewujudkan hasil yang mau dicapai. Oleh karena itu, implementasi merupakan sesuatu tahapan yang berarti dalam kebijakan publik. Walaupun sesuatu kebijakan sudah mempunyai tujuan yang baik, tetapi

dalam pengimplementasiannya terjalin kegagalan hingga tujuan dari program tersebut tidak hendak tercapai (Yulianti, 2020).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “program” artinya rancangan mengenai azas serta usaha yang dilaksanakan. Program adalah sebuah hal yang direncanakan dan didalamnya mencakup suatu usaha yang ingin dilakukan meski tidak semuanya bisa direalisasikan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id.>).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program adalah rancangan yang akan dilakukan. Sedangkan program secara khusus adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Nurjanah, 2020).

Pengertian program terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa “program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

Program didefinisikan secara relatif serta khusus dibidang aktivitas pemerintah yang mengaitkan sesuatu kemasam ataupun wujud tertentu dari undang-undang, organisasi, serta sumber energi. Program umumnya di pandang selaku fasilitas pemerintah dalam mengejar tujuan yang lebih luas ataupun tujuan akhir (Ngetje, 2021).

Menurut Jones (1996) dalam (Ponamon, 2021) program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- 1) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- 2) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- 3) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia merupakan program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, ialah: saat sebelum memastikan permasalahan sosial yang mau diatasi serta mengawali melaksanakan intervensi, hingga tadinya wajib terdapat pemikiran yang sungguh- sungguh terhadap gimana serta kenapa permasalahan itu terjalin serta apa yang jadi pemecahan terbaik.

## **II.3 Konsep Listrik Pintar (Prabayar)**

### **II.3.1 Listrik Pintar (Prabayar)**

Listrik Pintar adalah layanan listrik Prabayar yang memungkinkan pelanggan untuk mengontrol penggunaan listriknya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sama halnya dengan isi ulang pulsa pada telepon seluler, dalam sistem kelistrikan pintar, pelanggan terlebih dahulu membeli *voucher*/token listrik isi ulang melalui outlet Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah bank atau melalui loket pembayaran tagihan listrik online. Token atau pulsa listrik yang terdiri dari 20 digit ini dimasukkan (diinput) ke dalam kWh



Meter khusus yang disebut Meter Prabayar (MPB). Layar MPB akan menampilkan sejumlah informasi penting yang dapat segera diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait penggunaan listrik mereka, seperti:

- a) Informasi jumlah energi listrik (kWh) yang dimasukkan (input).
- b) Besaran energi listrik (kWh) yang digunakan selama ini
- c) Besarnya energi listrik yang digunakan saat ini (real time).
- d) Jumlah energi listrik yang masih tersisa.

Pasokan kWh dapat ditambahkan setiap saat dan setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika energi listrik yang tersimpan dalam MPB hampir habis maka MPB akan memberikan sinyal awal agar dapat segera diisi ulang. Dengan demikian, pelanggan dapat mengetahui secara tepat dan real time penggunaan listrik di rumah setiap saat dan setiap saat. Pelanggan juga dapat mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik (<https://web.pln.co.id>).

Penerbitan program Listrik Pintar (Prabayar) sebagai wujud komitmen PLN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk inovasi. Kebijakan kelistrikan pintar dimulai pada tahun 2002 ketika kepemimpinan direktur utama Edi Widiono berdasarkan surat edaran dari Direksi PT. PLN (Persero) No.035.E/012/DIR/2001 tanggal 31 Desember 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Multiguna Prabayar. Bertahun-tahun produk ini mengalami penyempurnaan hingga tahun 2008 produk ini mengemuka, meski akhirnya diresmikan pada tahun 2009 sesuai Surat Direksi PT. PLN (Persero) No. 01809/532/DITJB/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Pintar, Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)

No.300.K/DIR/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Ketentuan Akuntansi Listrik Pintar, Surat Direksi PT. PLN (Persero) No.01178/532/DITBMR/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Implementasi Listrik Pintar dan terakhir Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1484.K/DIR/2011, tanggal 23 Desember 2011 tentang Branding Produk Listrik Pintar (Kadim, 2018).

### **II.3.2 Kelebihan Listrik Pintar (Prabayar)**

Viciwati (2016) banyak manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh pelanggan dengan adanya program listrik prabayar ini, antara lain:

1. Tidak ada beban listrik bulanan ataupun minimal pemakaian. Jika pada listrik pascabayar misalnya untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA dikenakan beban Rp 18.000/bulan ditambah PPj, sedangkan pada listrik prabayar beban ini tidak ada. Pada listrik rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas minimal pemakaian adalah 40 jam dan bahkan ada yang 55 jam. Kalau tidak dipakai berarti harus bayar 40 jam atau 55 jam. Kalau pada listrik prabayar semua ini tidak ada, jadi kalau tidak dipakai walau tidak diisi pulsa tidak apa-apa.
2. kWh meter pada listrik prabayar adalah sistem digital sedangkan pada listrik pascabayar masih analog, yang namanya digital tentu lebih akurat dibandingkan sistem analog.
3. Privasi terjamin sebab tidak akan pernah dikunjungi pencatat meter sedangkan pada PLN Pascabayar setiap bulan dikunjungi pencatat meter.
4. Pemakaian lebih terkontrol dibandingkan PLN Pascabayar dimana dengan menggunakan PLN Prabayar kita diarahkan untuk hemat listrik. Jika pada PLN Pascabayar kita menggunakan energi listrik dengan boros misalnya

Televisi walaupun tidak ada yang menonton, televisi tetap dihidupkan, kalau pada PLN Prabayar kita tentu akan mengontrol pemakaian sebab jangan sampai pulsa habis. Apalagi kalau pulsa strom pada meter listrik prabayar kita tersisa sedikit maka kita tentunya akan mengontrol pemakaian misalnya mengurangi lampu yang menyala saat tidur, mengurangi pemakaian televisi dan lain sebagainya.

5. Efisien dan hemat waktu. Maksudnya adalah jika pada listrik pascabayar kita diharuskan sebelum tanggal 20 harus bayar tagihan listrik walaupun tidak dipakai, kalau pada listrik prabayar tentu kita tidak akan seperti itu apalagi pemakaian listrik bulanan kita hanya sedikit. Misalnya kita hanya memakai lampu dan tidak memiliki alat elektronik lainnya, jika menggunakan listrik prabayar 900 VA mungkin tagihan kita tidak sampai Rp 30.000 (termasuk beban dan PPj), coba kita bayangkan setiap bulan kita ke loket pembayaran, bank, kantor pos atau loket online lainnya, lebih-lebih jika kita memakai listrik prabayar, kita membeli pulsa nominal Rp 100.000 mungkin 6 bulan lagi barus kita mengisi pulsa.
6. Pada golongan tarif tertentu (umumnya daya 1.300 VA ke atas), tarif dasar antara PLN Prabayar dan PLN Pascabayar adalah sama. Jadi dari pada kita dikenai pemakaian minimum (pakai tidak pakai harus bayar) lebih baik pakai listrik prabayar.
7. Biaya pasang baru (BP) lebih murah karena hanya dibebani token perdana (untuk pulsa listrik awal) sedangkan pada listrik pascabayar kita dikenakan lagi uang jaman langganan (UJL).
8. Layanan pembelian pulsa lebih luas dibandingkan pada PLN pascabayar. Saat ini penjual pulsa HP sudah ada yang menjual pulsa listrik namun belum

tentu melayani pembayaran tagihan listrik pascabayar, sedangkan loket yang melayani pembayaran listrik Prabayar sudah pasti menjual pulsa listrik Prabayar.

9. Pengeluaran lebih ekonomis dibandingkan listrik pascabayar. Pada listrik pascabayar kita diharuskan membayar tagihan kita seluruhnya + biaya admin berapapun jumlahnya. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau uang kita tidak cukup mau tidak mau kita harus kembali lagi ke rumah, dan kalau kita tunda mungkin esok harinya (tanggal 21 ke atas) listrik di rumah kita akan disegel atau diputus aliran listriknya, tetapi kalau listrik Prabayar berapapun uang kita (minimal Rp 20.000), kita dapat membeli pulsa listrik.
10. Pelanggan listrik Prabayar diberi kartu listrik pintar dimana pada kartu tersebut sudah tercetak nomor meter pelanggan, hanya dengan menunjukkan kartu, kita dapat melakukan pembelian pulsa, selain itu pada kWh meter juga tercatat berapa nomor meter kita, selain nomor meter juga ada nomor pelanggan atau ID Pelanggan seperti pada listrik pascabayar. Jadi tinggal kita memilih pakai ID Pelanggan atau nomor meter sama saja, kalau pada listrik pascabayar hanya ID Pelanggan saja dan tidak diberi kartu listrik pintar juga pada kWh meter listrik pascabayar umumnya tidak tercatat ID Pelanggan.
11. Menjaga rumah dari resiko kebakaran. Jika dalam rumah kita instalasi kabel listrik bermasalah, pada kWh meter Prabayar ada indikator bahwa instalasi kabel dalam rumah kita bermasalah (namanya juga listrik pintar, bisa deteksi instalasi kabel lho), kalau demikian halnya maka untuk menghindari resiko kebakaran kita akan memeriksa instalasi kabel di rumah kita ataupun kita menghubungi petugas PLN, sedangkan pada listrik pascabayar indikator

seperti. kWh meter Prabayar dapat mendeteksi apakah instalasi kabel dalam rumah kita terhubung atau tidak misalnya MCB dalam keadaan off akan dideteksi.

12. Listrik Prabayar tidak serta merta mendapatkan kenaikan tarif dasar listrik. Jika pemerintah menaikkan tarif dasar listrik, nilai kWh yang telah masuk ke meter Prabayar tidak ikut naik. Selain itu misalnya jika pemerintah menaikkan TDL per 1 Januari 2014, pelanggan yang melakukan pembelian pulsa listrik sampai 31 Desember 2013 tidak dikenakan kenaikan TDL, sedangkan pelanggan listrik pascabayar tagihan bulan 1 Januari tentu sudah naik dan tidak dapat dibayar pada bulan Desember.

### **II.3.3 Kelemahan Listrik Pintar (Prabayar)**

Selain keuntungan, ternyata terdapat juga beberapa kekurangan atau kelemahan dari listrik pintar ini (Viciwati, 2016) antara lain:

1. Pada beberapa golongan tarif misalnya tarif rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA tarifnya lebih mahal dibandingkan listrik Prabayar. Tetapi kita dapat mengkalinya dengan menggunakan peralatan listrik yang pentingTpenting saja. Perlu kita ketahui juga bahwa jika pemakaian listrik Anda hampir 100% rataTrata dalam sebulan, pemakaian pulsa listrik Anda tidak akan sampai pada nilai Rp 450.000 (jika PPj lebih kurang 7%) untuk daya R1/900 VA, yang 450 VA tentu lebih sedikit lagi.
2. Pembelian pulsa listrik tidak periodik. Bagi yang pemakaian listriknya banyak mungkin akan membeli pulsa listrik lebih dari 1 kali dalam sebulan. Tetapi yang jelas jika pemakaian listrik banyak Anda dapat membeli pulsa yang nominal besar, sebab nominal pulsa listrik tersedia hingga nilai Rp 2.000.000,

(dua juta rupiah). Nominal pulsa listrik yang tersedia di pasaran saat ini adalah 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 75.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 1.000.000 dan 2.000.000.

3. Pulsa habis (kWh habis) berarti strom habis tentu listrik mati/padam, sehingga pelanggan listrik prabayar ada 2 (dua) kemungkinan listriknya padam yakni pemadaman dari PLN dan pulsa habis. Namun pada kWh meter prabayar jika sudah dilengkapi dengan alarm dimana jika kWh sudah menunjukkan nilai 10 kWh maka alarm pada kWh meter akan berbunyi, jika alarm berbunyi sebaiknya segera melakukan pembelian pulsa listrik prabayar.

#### II.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel.

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rima Kadim (2018)	Implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar di Kecamatan Palu Timur	Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar di Kecamatan Palu Timur Oleh PT. PLN (Persero) Cabang Palu Kota terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi ( <i>communication</i> ), sumber daya ( <i>resources</i> ), disposisi ( <i>dispositions</i> ) dan struktur birokrasi ( <i>bureaucratic</i> ). Dari keempat indikator tersebut terdapat sub indikator yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya sub indikator fasilitas fisik, implementor kebijakan dan sikap

			pembuat kebijakan yang bermuara pada penciptaan hasil yang baik.
2.	Alma Alvionita Sitohang (2018)	Implementasi Program Layanan Listrik Pintar (Prabayar) Di PT. PLN Ranting Medan Denai	Implementasi Program Layanan Listrik Pintar (Prabayar) di PT. PLN Ranting Medan Denai secara umum sudah berjalan secara menyeluruh tetapi juga masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait program layanan listrik pintar (prabayar), kurangnya koordinasi dengan organisasi dan koordinasi dengan kemitraan yang belum efektif sehingga dapat dikatakan belum terlaksananya program ini secara baik. Implementasi Program Layanan Listrik Pintar (Prabayar) di PT. PLN Ranting Medan Denai



			dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi serta disposisi implementor.
--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa perbedaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya perbedaan teori yang digunakan oleh Alma Alvionita Sitohang (2018) dengan judul Implementasi Program Layanan Listrik Pintar (Prabayar) di PT. PLN Ranting Medan. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori Implementasi menurut Edwards III (1980) yang menggunakan indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sebagai alat ukur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan pada penelitian oleh Sitohang (2018) teori yang digunakan adalah teori Van Horn (1975) dimana menggunakan indikator Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivasi, Standar sasaran kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, kinerja kebijakan, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Sedangkan perbedaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada lokus penelitian dimana penulis mengambil lokasi

Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Sedangkan Kadim (2018) bertempat pada lokasi Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi struktur dan kondisi lapangan dalam menentukan hasil penelitian.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Listrik Pintar (Prabayar). Untuk mengetahui atau menjawab permasalahan penelitian, peneliti menggunakan teori Edwards III (1980) yang mengemukakan pandangannya bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

**a) *Communication* (Komunikasi)**

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Secara alami, komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh para implementor. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, namun mereka mesti juga jelas. Jika tidak, para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) untuk mendorong tinjauannya dalam implementasi kebijakan, memandang bahwa mungkin berbeda dengan pandangan atasannya.

**b) *Resources* (Sumber Daya)**

Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah kemungkinan menjadi tidak efektif. Sebagaimana contoh ini, dimana sumberdaya bisa menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

**c) *Dispositions (Disposisi)***

Disposisi implementor, jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara rumit. Banyaknya kebijakan jatuh dalam "*some apathy*". Kebijakan ini kemungkinan akan diimplementasikan secara meyakinkan karena para implementor tidak memiliki perasaan kuat mengenainya. Kebijakan lain, bagaimanapun juga, akan mengalami konflik langsung dengan tinjauan kebijakan atau kepentingan implementor secara pribadi atau organisasional. Ketika orang-orang ini diajak untuk mengamalkan peraturan dengannya mereka tidak setuju, penyimpangan yang tidak direlakkan lagi terjadi diantara keputusan kebijakan-kebijakan dan kinerja. Dalam kasus demikian implementor akan mengamalkan seleksinya, kadang dalam berbagai cara yang mendiskriminasikan, untuk menunda implementasi.

**d) *Bureaucratic Structure (Struktur Biokrasi)***

Bahkan jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena

kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasional mungkin merintang koordinasi yang perlu untuk mengimplementasikan dengan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang, dan mungkin juga memboroskan sumberdaya langka, merintang perubahan, menciptakan kekacauan, mengarahkan kepada kebijakan bekerja dalam lintas-tujuan, dan menghasilkan fungsi-fungsi penting yang terabaikan. Sebagaimana unit-unit organisasional selenggarakan kebijakan mereka mengembangkan prosedur pengoperasian standar (*standard operating procedur*) SOP, untuk menangani situasi rutin alam pola hubungan yang beraturan. Malangnya, SOP yang dirancang untuk kebijakan-kebijakan masa depan sering tidak tepat bagi kebijakan-kebijakan baru dan mungkin menyebabkan perintang terhadap perubahan yang tidak diinginkan. SOP kadang merintang bukan membantu implementasi kebijakan.

Berdasarkan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh George C. Edward III (1980), peneliti akan menggunakan empat indikator tersebut. Berikut adalah gambaran kerangka fikir yang digunakan oleh peneliti pada penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar (Prabayar) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewall Mandar.

**Gambar II.6 Kerangka Pikir**

